

PERILAKU PEMILIH TERHADAP KANDIDAT PEREMPUAN

(Studi Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Luwu Utara)

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister S-2
Program Studi Jender dan Pembangunan



Oleh:

Ananda Rezky Wibowo

P072191004

STUDI JENDER DAN PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

“Perilaku Pemilih Terhadap kandidat Perempuan (Studi Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Luwu Utara)”

Disusun dan diajukan oleh:

ANANDA REZKY WIBOWO
P072191004

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Jender dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin pada tanggal 05 Februari 2021.
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

af Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si
NIP: 19601123 198603 2 001

Pembimbing Pendamping

af Dr. Phil. Sukri, M.Si
NIP: 19750818 200801 1 008

Ketua Program Studi
Jender dan Pembangunan

af Prof. Dr. Ir. Nursini, SE., MA
NIP: 19660717 199103 2 001

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc
NIP: 19670308 199003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ananda Rezky Wibowo
NIM : P072191004
Program Studi : Jender dan Pembangunan
Jenjang : Magister

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

“Perilaku Pemilih Terhadap kandidat Perempuan (Studi Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Luwu Utara)”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 05 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Ananda Rezky Wibowo

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, atas segala curahan rahmat, nikmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi persyaratan dalam penyelesaian pendidikan S2 Prodi Gender dan Pembangunan di Universitas Hasanuddin Makassar. Salawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw, seorang pendidik paling agung, juga teriring salam untuk keluarga beliau, para sahabat, dan segenap manusia yang mengikuti jejak dan sunnah beliau sampai akhir zaman.

Proses penyusunan dan penulisan tesis ini banyak hambatan yang penulis hadapi dan sempat tertunda lama sebab bencana banjir bandang yang menimpah Kabupaten Luwu Utara yang menjadi lokasi penelitian, namun berkat bantuan dan dorongan dari beberapa pihak, *Alhamdulillah* dapat terselesaikan meskipun masih memiliki banyak kekurangan. Secara pribadi saya selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pubuluhi, MA., Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar
3. Prof. Dr. Ir. Nursini, SE., MA., Selaku Ketua Program Studi Jender dan Pembangunan.

4. Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si., Selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Phil Sukri, M.Si., Selaku Dosen Pembimbing II
5. Dr. Ir. Mardiana E. Fachri, MS., Dr. Mansyur Radjab, M.Si., dan Dr. Muh. Iqbal Sultan, M.Si., Selaku Dewan Penguji.
6. Ibu, Bapak Dosen yang telah memberikan ilmunya beserta seluruh staff akademik yang turut membantu dalam proses administrasitif mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
7. Kedua Orang Tua Penulis, Agung Raharjo dan Sukmawati serta adik-adikku Dwi Wahyu Mutiara, Al-Faathir Islami dan Tegar Pamungkas yang telah memberikan bantuan baik moril dan materil.
8. Kepada teman-teman yang ada di Masamba, di Makassar dan teman-teman relawan bencana banjir Masamba semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih semangat dan dorongan dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan mampu menjadi amal sholeh dan senantiasa mendapat Ridho Allah SWT. Sehingga pada akhirnya tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pada umumnya bagi kita semua. Terima Kasih.

Makassar, 05 Februari 2021

ANANDA REZKY WIBOWO

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TESIS	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Yang Relevan	8
B. Tinjauan Teoritik	15
1. Jender dan Politik	15
2. Partisipasi dan Partai Politik	18
3. Perilaku Politik	22
C. Kerangka Pikir Konseptual	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Sumber Data	27
D. Jenis Data	30
E. Metode Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Lokasi Penelitian	35
1. Letak Geografis	35
2. Kependudukan	37
3. Pemerintahan	38
4. Keadaan Politik di Lembaga Legislatif dan Eksekutif.	39
5. Jumlah Data Pemilih Tetap	42
6. Persentase Keterwakilan Perempuan	43
7. Rekapitulasi Suara Partai Politik Pada Pemilihan Legislatif 2019	47
B. Orientasi, Standar Nilai dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih Terhadap Perempuan....	48
1. Pengaruh Keberadaan Elit Terhadap Perilaku Pemilih	57
2. Partai Politik dan Perilaku Pemilih	73
3. Pengaruh Jaringan Kekuasaan dan Kekeluargaan Terhadap Pencalonan Legislatif Perempuan yang Terpilih pada Periode 2014-2019.....	79
4. Pengaruh Uang Terhadap Perilaku Pemilih	84
 BAB V PENUTUP	 91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
 DAFTAR PUSTAKA	 95
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka	8
Tabel 3.2 Informan calon legislatif perempuan dengan suara terbanyak dan yang paling sedikit.....	29
Tabel 3.2 Informan dari partai politik dengan suara terbanyak dan yang paling sedikit.....	29
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan	36
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin	37
Tabel 4.3 Jumlah Desa dan Kelurahan	38
Tabel 4.4 Jumlah PNS Kabupaten Luwu Utara	39
Tabel 4.5 Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik 2019-2023	40
Tabel 4.6 Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik 2014-2019	41
Tabel 4.7 Jumlah Pemilih Tetap	42
Tabel 4.8 Persentase Keterwakilan Perempuan Dapil 1	43
Tabel 4.9 Persentase Keterwakilan Perempuan Dapil 2	44
Tabel 4.10 Persentase Keterwakilan Perempuan Dapil 3	45
Tabel 4.11 Persentase Keterwakilan Perempuan Dapil 4	46
Tabel 4.12 Jumlah Suara Partai Politik	48
Tabel 4.13 Perbandingan jumlah Keterpilihan legislatif Perempuan di Kab/Kota se Sulawesi Selatan	56
Tabel 4.14 Perolehan Suara Perempuan Tertinggi di Kabupaten Luwu Utara	68
Tabel 4.15 Dominasi Elit di beberapa kelompok etnis di Luwu Utara	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	25
--------------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Rekapitulasi Hasil Suara Eksekutif 2015-2020.....	42
---	----

ABSTRAK

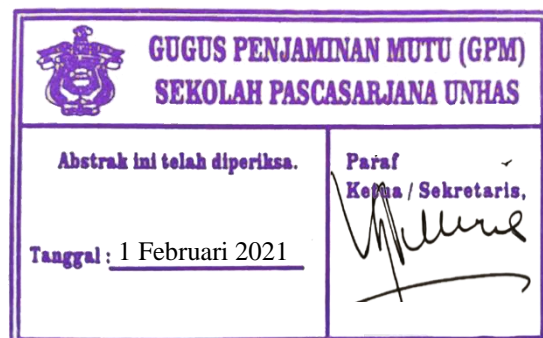
ANANDA REZKY WIBOWO. *Perilaku Pemilih terhadap Kandidat Perempuan (Studi Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Luwu Utara).* (dibimbing oleh **Rabina Yunus** dan **Sukri**)

Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai orientasi dan standar nilai pemilih terhadap kandidat perempuan serta faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya pada kontestasi pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Luwu Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, informan sebagai sumber data dipilih menggunakan *purposive sampling*. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya kandidat perempuan yang lolos di lembaga legislatif di Kabupaten Luwu Utara memperlihatkan pengimplementasian kebijakan *affirmative action* kuota 30 persen keterwakilan perempuan tidak berjalan optimal, meskipun perilaku pemilih tidak lagi signifikan mempersoalkan permasalahan gender dalam politik. Hal ini disebabkan dari faktor dominasi elit politik laki-laki yang secara sosiologis mempunyai pengaruh besar karena masyarakat pemilih masih melihat eksistensi dari elit-elit politik ini. Selain itu disebabkan kegagalan partai politik melakukan kaderisasi dan membangun komitmen politik terhadap perempuan. Meskipun di periode 2014-2019 terdapat dua wakil perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Luwu Utara, tetapi pada pemilihan 2019-2024 mereka tidak terpilih kembali karena tidak lagi memiliki jaringan kekuasaan dan kekeluargaan. Faktor yang paling krusial juga ialah akibat situasi politik uang masih menjadi alat kompromi dalam proses-proses pemilihan, sehingga hal ini membuat calon perempuan tidak ada yang terpilih karena ketidakmampuan mereka bersaing dengan arus politik uang meskipun telah mengeluarkan ongkos politik yang tidak sedikit. tindakan irasional ini (politik uang) merusak tatanan alur pemilihan yang ideal.

Kata kunci: *affirmative action, orientasi politik, elit politik, partai politik*



ABSTRACT

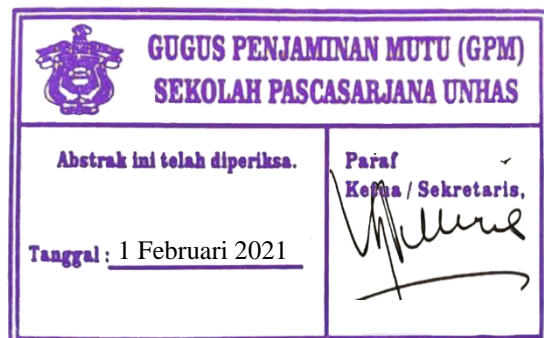
ANANDA REZKY WIBOWO. The Voters Behavior Towards Women Candidates in the 2019 Legislative Election in North Luwu Regency. (supervised by Rabina Yunus dan Sukri)

This study aims to examine the orientation and value standards of voters for female candidates as well as the factors that influence voters in determining their choices in the 2019 legislative election contestation in North Luwu Regency.

This type of research is qualitative research, the informants as the data source were selected using *purposive sampling*. Data obtained from observations, in-depth interviews and documentation. Data analysis by means of data reduction, data presentation and conclusion.

The results showed that the absence of female candidates who passed in the legislative body in North Luwu Regency showed that the implementation of the policy *affirmative action* of the 30 percent quota of women's representation did not run optimally, even though voter behavior was no longer significant in questioning gender issues in politics. This is due to the domination factor of male political elites which sociologically has a big influence because the voting community still sees the existence of these political elites. In addition, it is due to the failure of political parties to regenerate and build political commitment to women. Although in the 2014-2019 period there were two female representatives in the legislative body of North Luwu Regency, in the 2019-2024 elections they were not re-elected because they no longer had a network of power and kinship. The most crucial factor is that money politics is still a compromise tool in the electoral process, so that no female candidate is elected because of their inability to compete with the flow of money politics even though it has incurred significant political costs. This irrational act (money politics) destroys the ideal electoral flow.

Keywords: *affirmative action, political orientation, political elite, political parties.*



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Politik merupakan arena kontestasi merebut kekuasaan. Namun, jika arena konstestasi ini tidak memberikan ruang yang adil bagi semua kepentingan, maka akan terjadi hegemoni kepentingan mayoritas terhadap kelompok minoritas. Pengalaman Amerika Latin dan negara Skandinavia yang berhasil dalam perjuangan kebijakan *affirmative action* menunjukkan keterlibatan perempuan menjadi mutlak dalam konstelasi politik untuk memperjuangkan perempuan. Di Indonesia, ketika memasuki Era Reformasi, gelora kesadaran tentang ketiadaan perempuan di lembaga-lembaga politik formal, legislatif, eksekutif dan yudikatif mulai mencuat dan pemikiran bahwa ketiadaan perempuan dalam lembaga pengambil keputusan berkolerasi terhadap rumitnya menyalurkan aspirasi perempuan.¹

Berbagai perombakan pergulatan politik di era reformasi dan perubahan konstalasi politik, peran perempuan di dalam demokrasi pun mengalami perubahan signifikan. Di keluarkannya aturan-aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi calon legislatif perempuan adalah salah satu capaian yang menandakan semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan. Aturan tersebut tertuang dalam beberapa Undang-undang, yakni UU Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2003, UU No. 31 Tahun 2002

¹Martha Tilaar, *Perempuan Parlemen Dalam Cakrawala Politik Indonesia*, Jakarta: Penerbit DIAN RAKYAT, 2013. H. 25

tentang Partai Politik, UU No. 2 Tahun 2008 mengenai Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009, UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Isu kehadiran perempuan di parlemen tidak terlepas dari hal-hal yang menjadi kepentingan perempuan itu sendiri sebab kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berbeda menjadi sesuatu yang penting. Isu peran sosial yang berbeda kemudian menjadi inti mengapa perempuan memerlukan keterwakilan dalam mengaspirasikan suara mereka. Kepentingan berbasis jender (*gender interest*) adalah kepentingan yang terbentuk secara kolektif sebagai sebuah hasil dari konstruksi peran jender dan hubungan antar jender.²

Kebijakan *affirmative action* memberi keuntungan terhadap akses perempuan untuk terlibat pada panggung politik terbuka, tetapi ketidaksiapan partai politik dalam mengantisipasi kebijakan ini membuat sebagian partai politik kewalahan mencari perempuan untuk memenuhi kuota 30 persen, terkadang partai menjaring perempuan dengan popularitas meroket dibandingkan yang memiliki kapasitas. Pragmatisme politik hadir dalam memenuhi kuota perempuan ini yang kemudian bisa saja menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap perempuan jika partai

² Dewi Haryani Susilastuti, Kepemimpinan Perempuan: Perubahan paradigma dari politik gagasan ke politik kehadiran. *Jurnal Perempuan* vol 18. Jakarta: 2013. H 11.

hanya merekrut calon perempuan untuk kepentingan pemenuhan kuota 30 persen saja tanpa memberikan pembekalan dan pendidikan politik.³

Alhasil, peluang calon perempuan untuk memperoleh perhatian masyarakat pemilih menjadi tidak maksimal meskipun kesempatan terbuka luas bagi perempuan. Realitas politik di lingkup legislatif ini, ditakutkan akan berpengaruh pada proses pengambilan keputusan kebijakan umum yang bisa saja menyebabkan “*gender blind*” karena tidak memahami kebutuhan spesifik perempuan dan lingkungannya.

Hakikatnya dalam pemilihan umum, rakyat berperan penting untuk memilih sendiri siapa wakilnya yang layak menduduki parlemen dan struktur pemerintahan, sebab sistem politik di Indonesia telah menggunakan hak rakyat dalam pemilihan.⁴ Namun, mengaitkan hal ini dengan *affirmative action* sebagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan menjadi hal penting dalam sebuah proses politik. Begitupun dalam membangun sistem demokrasi pada suatu negara, seharusnya partai politik menjadi sarana efektif untuk menunjang kualitas demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah juga dalam hal kaderisasi dan pembekalan kandidat perempuan yang maju dalam kontestasi politik.

Pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Luwu Utara, terjadi fenomena politik yang kemudian membuat posisi perempuan di dalam

³Asri Abdullah, *Politik Kota Studi Perilaku Pemilih Kota Makassar*. Makassar: Philosophia Press, 2014. H 102

⁴Hafied Cangara, *Komunikasi politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, H. 165.

politik menjadi hilang. Menurut data daftar calon legislatif tetap Kabupaten Luwu Utara, ada 375 keseluruhan kandidat, yang di antaranya terdiri 241 kandidat laki-laki dan 134 kandidat perempuan⁵ yang bertarung, namun tidak ada satupun kandidat perempuan yang terpilih.

Hasil yang berbeda jika menengok kebelakang pada konteks pemilihan eksekutif yaitu pilkada serentak 2016 di Kabupaten Luwu Utara, terpilihnya perempuan sebagai Bupati menjadi bahasan tersendiri dalam poros politik di daerah. Indah Putri Indriani semenjak sebelumnya menjadi wakil bupati menghasilkan pemahaman kesetaraan jender yang terproduksi di masyarakat dan menjadi wacana yang kontributif dalam sirkulasi politik dan pemerintahan di Luwu Utara. Konstruksi ini kemudian meluas dan menjadi modalitas bagi perkembangan pemahaman perempuan dalam ranah publik. Hingga pada transmisi politiknya kemudian, mengantarkannya terpilih menjadi Bupati. Namun sayangnya, euphoria masyarakat memilih perempuan yang bertarung di dalam politik tidak melat dan bertahan. Pilkada 2016, Indah Putri Indriani berhasil terpilih menjadi Bupati, akan tetapi di Pileg 2019 tidak ada kandidat perempuan yang berhasil terpilih sebagai wakil rakyat di parlemen Luwu Utara, semuanya diduduki oleh laki-laki.

Fenomena politik ini kemudian menjadi isu hangat sebab jelas menunjukkan perilaku pemilih yang berbeda terhadap kandidat perempuan. Banyaknya pilihan pemilih di Pemilihan legislatif 2019

⁵ Lampiran Keputusan KPU Kab. Luwu Utara Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu DPRD Tahun 2019, diunduh dalam *portal resmi* <https://kab-luwuutara.kpu.go.id> pada 14 Maret 2019 pukul 11.13 Wita

ditambah lagi dengan calon legislatif yang terkuat (elit politik) mayoritas dari kaum laki-laki membuat daya kandidat perempuan tidak menemui hasil yang maksimal. Pilkada 2016, pemilih melihat kandidat yang dipilihnya berdasarkan figuritas dari diri Indah Putri Indriani⁶. Sedangkan di Pileg 2019, tidak ada figur perempuan yang terpilih.

Hasil perolehan suara dalam hal memilih perempuan di ranah eksekutif dan legislatif mengindikasikan bahwa perilaku politik masyarakat Luwu Utara masih belum dapat di ramalkan meski semua partai yang ikut dalam kontestasi politik ini memiliki calon perempuan karena harus memenuhi kuota 30 persen.

Berdasarkan hal itu, peneliti tertarik menganalisis terkait realitas politik ini khususnya perilaku pemilih di Kabupaten Luwu Utara, karena adanya perbandingan pilihan yang sangat jelas dalam proses politik lingkup pemilihan legislatif sehingga menghasilkan disparitas perolehan suara yang sangat mencolok antara laki-laki dan perempuan di legislatif, khususnya juga kandidat perempuan itu sendiri. Sehingga adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu **Perilaku Pemilih Terhadap Kandidat Perempuan (Studi Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Luwu Utara)**.

⁶ Ananda Rezky Wibowo, Perempuan dan Kepemimpinan Politik (Studi Terpilihnya Indah Putri Indriani sebagai Bupati di Kab. Luwu Utara), *Skripsi* Jurusan Ilmu Politik, 2017. H.55

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkaji mengenai perilaku pemilih di pemilihan legislatif 2019 Kabupaten Luwu Utara, studi ini bermaksud menelaah mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana orientasi dan standar nilai pemilih terhadap kandidat perempuan pada kontestasi politik legislatif di Kabupaten Luwu Utara?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pemilih di dalam menentukan pilihan politiknya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait fenomena politik yang menjadi suatu bahan kajian utama, dengan menghimpun jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang telah dirumuskan sebagai suatu upaya menganalisis permasalahan yang dibahas, berdasarkan hal itu tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui orientasi dan standar nilai pemilih dalam menentukan kandidat yang dipilihnya khususnya terhadap kandidat perempuan dalam kontestasi politik di Kabupaten Luwu Utara dengan berdasarkan standar nilai kesetaraan jender dan kebijakan *Affirmative Action* sesuai UU No. 22 Tahun 2007

tentang Penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya pada pemilihan legislatif Kabupaten Luwu Utara yang di analisis dengan teori perilaku pemilih dengan pendekatan faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor rasional yang di terjemahkan secara umum dalam hasil penelitian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun maksud dari tercapainya tujuan penelitian ini, maka diharapkan kajian ini memberikan manfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti:

1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menambah khasanah keilmuan sekaligus berpartisipasi aktif dalam mengembangkan pemikiran di ranah aktualisasi jender dan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan cakupan isu politik.
2. Penelitian ini menjadi rujukan bagi kalangan akademisi dalam upaya penelitian yang berkelanjutan, juga sebagai rujukan bagi pelaku politik praktis, baik di ranah legislatif maupun eksekutif sebagai acuan untuk membuka ruang pemikiran tentang pentingnya peran perempuan di dalam konstelasi politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Uraian konsep dan teori yang menjadi dasar penelitian sehingga peneliti dapat memahami tema penulisan sesuai dengan landasan yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini juga mencakup karya penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan serta kerangka pikir yang digunakan untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang akan dilakukan dan semua hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

A. Penelitian yang Relevan

Menjawab masalah-masalah dan mencapai tujuan penelitian, perlu melihat perbandingan dan relevansi kajian dengan beberapa penelitian yang relevan untuk mempermudah dalam proses memperoleh hasil yang maksimal terhadap kajian yang sedang dilakukan. Berikut adalah matriks tabel beberapa tinjauan pustaka dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel. 2.1 Tinjauan Pustaka

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Relevansi Penelitian
1	Laura Sartori	<i>The Social Roots of the Gender Gap in Political Participation the Role of Situational and Cultural Constraints in Italy</i>	Menyelidiki peran struktural dan kendala situasional dalam konteks Italia yang sangat kontras gender. Kendala seperti itu membuat waktu perempuan jauh dari politik.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu lebih melihat ke arah situasional yang sebetulnya sudah tidak kontras jender dan tidak menjauhkan	Relevansinya dengan penelitian ini yaitu terkait dengan studi partisipasi politik dan menggabungkannya dengan perspektif studi gender

			Melihat bahwa ada kesenjangan yang luar biasa antara perempuan dan laki-laki dalam kegiatan politik yang memakan waktu dan kendala situasional yang sangat kontradiktif dan memiliki dampak negatif pada partisipasi perempuan dan secara mengejutkan juga memiliki efek negatif pada keterlibatan pria yang tidak mengakomodir aspirasi kebutuhan perempuan. ⁷	perempuan dari lingkup politik sebab pemahaman patriarki sudah tidak begitu dominan dengan daerah Luwu Utara telah di Pimpin oleh seorang perempuan, hanya saja pada sektor legislatif di pemilihan periode 2019, terdapat situasi yang membuat seluruh caleg perempuan gagal yang artinya bahwa keterpilihan parlemen Luwu Utara yang di isi semua laki-laki di takutkan nantinya tidak mengakomodir aspirasi kebutuhan perempuan.	yang kemudian melihat realitas politik terhadap kam perempuan itu sendiri. Di dalam analisis mengenai perilaku politik, partisipasi juga merupakan point penting untuk di alami sehingga dapat melihat aspek yang mempengaruhi perilaku itu sendiri.
2	Febrianto Syam	Pemilu dan Perempuan (Studi Kasus: Modal Sosial dan Strategi Anggota Legislatif Perempuan DPR RI Terpilih	modal sosial yang dimiliki oleh masing-masing Anggota legislatif perempuan yang terpilih menjadi kunci mereka untuk terlibat dalam	Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini melihat kepada hal-hal yang menyebabkan ketidakterpilihan seluruh kandidat perempuan	Relevansinya yaitu bahwa penelitian tersebut dapat dijadikan referensi yang menarik

⁷ Laura Sartori, Dario Tuorto, Rossella Ghigi, The Social Roots of the Gender Gap in Political Participation the Role of Situational and Cultural Constraints in Italy, *Social Politics International Studies in Gender*, Volume 24 No. 3, 2017. H. 221

		Sulawesi Selatan Dalam Pemilu 2014)	pencalonan pada pemilu 2014 silam. Faktorfaktornya adalah pertama, karena kelima Anggota legislatif perempuan terpilih merupakan keluarga dari penguasa di daerah Sulawesi Selatan, maka dengan mudah dukungan birokrasi diberikan kepada mereka. Kedua, adanya beberapa bentuk kecurangan seperti money politics serta bentuk pelanggaran pemilu guna memenangkan kelimanya menyebabkan mereka berhasil memperoleh suara yang signifikan di daerah dimana keluarga mereka berkuasa. ⁸	yang bertarung dalam proses kontestasi pemilihan legislative di Kabupaten Luwu Utara.	untuk mengetahui faktor-faktor adanya yang mempengaruhi kandidat perempuan, terutama menyoal permainan politik uang.
3	Carmen Geha	<i>The Myth of Women's</i>	Menggunakan kasus di	Perbedaannya yaitu bahwa	Relevansinya yaitu

⁸ Febrianto Syam., Pemilu dan Perempuan (Studi Kasus: Modal Sosial dan Strategi Anggota Legislatif Perempuan DPR RI Terpilih Sulsel dalam PEMILU 2014), Tesis Universitas Indonesia, 2015.

		<p><i>Political Empowerment within Lebanon's Sectarian Power-Sharing System</i></p>	<p>Libanon, tulisan ini menyajikan wawasan empiris menyoroti ketidakcocokan antara apa yang ditawarkan pada program dan regulasi yang ada dan apa yang perempuan anggap sebagai tantangan nyata yang mereka hadapi. Penelitian ini memberikan kontribusi tiga hal. <i>Pertama</i>, ia memperluas kritik terhadap pemberdayaan politik perempuan untuk memasukkan program berfokus pada membantu perempuan mencalonkan diri dalam pemilihan; <i>kedua</i>, bertujuan menerapkan institusionalisme feminis pada etno-nasionalis sistem pembagian kekuasaan; dan <i>ketiga</i>, menyoroti persimpangan</p>	<p>dalam penelitian bukan lagi menyoal mengenai ketidakcocokan regulasi yang menyebabkan perempuan susah untuk masuk di politik, melainkan bahwa regulasi di Indonesia sudah sangat menunjang perempuan untuk turut andil dalam politik akan tetapi yang menjadi kendala bahwa adanya pola implemmentasi dalam rekrutmen kandidat perempuan di parpol yang menyebabkan daya kandidat perempuan tidak maksimal di politik di tambah lagi realitas politik di lapangan yang tidak menguntungkan perempuan.</p>	<p>bahwa penelitian ini juga membahas pemberdayaan politik perempuan yang fokus pada peran perempuan untuk mencalonkan diri di jabatan politik juga beserta kendala—kendala yang tidak begitu mendukung perempuan di dalam kontestasi politik.</p>
--	--	---	---	--	--

			tantangan kelembagaan formal dan informal dengan membawa wawasan empiris dari perempuan Lebanon. ⁹		
4	Agus Machfud Fauzi	Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019	Pada Orde Lama pemilih bebas menentukan pilihan sesuai dengan orientasi politik yang didianut. Bergeser ke Orde Baru pemilih terbatas pilihannya karena yang diperbolehkan hidup hanya dua partai politik dan golongan karya. Hadirnya Orde Reformasi membuka kembali pilihan warga yang membuat perilaku pemilih mengikuti perubahan zaman. Menyongsong Pemilu 2019 perilaku pemilih lebih menarik lagi	Perbedaannya yaitu penelitian tersebut melihat dinamika perilaku politik dan membandingkannya sesuai dengan zaman politik yang berganti, sedang penelitian ini lebih menyoal perilaku pemilih di era kekinian yang terfokus pengaruh dari perilaku pemilih itu terhadap kandidat perempuan. Artinya bahwa salah satu dinamika yang disoroti dalam penelitian ini lebih menekankan kepada aspek jender dan politiknya.	Relevansinya yaitu bahwa point penting dari pembahasan mengenai perilaku pemilih menjadi daya tarik tersendiri dalam proses kontestasi perpolitikan tahun 2019. Aspek perilaku pemilih menjadi relevan dengan kedua penelitian ini sehingga lebih banyak nantinya menghasikan dinamika yang mempengaruhi perilaku pemilih yang

⁹ Carmen Geha, The Myth of Women's Political Empowerment within Lebanon's Sectarian Power-Sharing System, *Journal of Women, Politics & Policy*, 2019. H. 1

			diperbincangkan sebab dinamika menyertai. ¹⁰		dapat di pelajari di dalam dunia kontestasi politik.
5	Johanna Kantola	<i>Gender and the Economic Crisis Political Parties as Sites of Feminist Struggles</i>	Melihat kampanye partai politik pada saat pemilihan parlemen Eropa di Finlandia (Mei 2014) terhadap penyediaan ruang oleh partai politik dalam perjuangan feminis. Selama momen politis di pemilihan parlemen Eropa 2014, sejumlah aktor feminis dalam partai dan organisasi perempuan melakukan upaya untuk kesetaraan hak-hak gender dalam forum-forum dan debat politik. Secara partisipatif, mereka sangat berperan dan berpengaruh dalam kaitannya memberi pengetahuan mengenai krisis ekonomi dan politik dalam	Perbedaannya yaitu penelitian tersebut memperlihatkan adanya ruang yang di berikan parpol untuk mewadahi perempuan sehingga dapat memperjuangkan aspek-aspek kesetaraan jender, tetapi di penelitian ini melihat sebaliknya bahwa meskipun regulasi telah mengatur dan mendukung keterlibatan perempuan akan tetapi parpol belum mampu mewadahi dan menunjang keterlibatan perempuan dalam politik itu sendiri.	Relevansinya yaitu kedua penelitian ini sama-sama melihat partai politik dalam penyediaan ruang untuk kaum perempuan dalam politik sehingga dapat mewadahi perempuan dalam memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan jender.

¹⁰ Agus Machfud Fauzi, Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019, *Journal of Islamic Civilization*. Vol. 1, No. 1, Maret 2019, Hal. 40

			<p>persoalan kesetaraan gender sebab adanya dominasi yang mengelabui dan mempersulit jalannya hak-hak kesetaraan gender baik dalam ekonomi keuangan serta realitas sosial politik dan mengerdikan hak perempuan. Keprihatinan aktor feminis ini dalam perjuangannya menegakkan kesetaraan gender mendapatkan apresiasi dan mempengaruhi orang-orang untuk juga ikut membicarakan dan turut memperjuangkan kesamaan hak.¹¹</p>		
--	--	--	--	--	--

Karya penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini akan memudahkan bagi peneliti untuk menentukan sisi kajian yang berbeda dan tentunya sebagai referensi dalam menyelesaikan penelitian ini.

¹¹ Johanna Kantola, Gender and the Economic Crisis Political Parties as Sites of Feminist Struggles, *Social Politics International Studies in Gender, State & Society*, Volume 25, Issue 3, Fall 2018. H. 361–382

B. Tinjauan Teoritik

1. Jender dan Politik

Persoalan yang menarik mengenai jender adalah peran-peran jender itu tidak tetap dan selalu berubah seiring waktu, berbeda antara satu kultur dengan kultur lainnya. Peran jender dipengaruhi oleh kelas sosial, usia dan latar belakang etnis. Istilah jender juga berguna karena istilah itu mencakup peran sosial kaum perempuan maupun laki-laki. Hubungan antara laki-laki dan perempuan seringkali sangat penting dalam menentukan posisi keduanya. Demikian, jenis hubungan yang bisa berlangsung antara perempuan dan laki-laki akan merupakan konsekuensi dari pendefinisian perilaku jender yang semestinya oleh masyarakat. Paling terpenting dari semua itu, kita berbicara seputar “jender dan pembangunan” karena ini menegaskan kenyataan bahwa inisiatif pembangunan apapun akan mempengaruhi kehidupan kaum laki-laki dan perempuan.¹² Oleh karena itu, kesetaraan pun harus direalisasikan sebagaimana mestinya agar kebutuhan dan aspirasi keduanya bisa terpenuhi dengan maksimal.

Satu dekade terakhir ini studi tentang jender dan politik memasuki tahap perkembangan yang sangat penting karena menyentuh perdebatan yang paling mendasar. Dari penelitian ini, konsep yang digunakan merupakan konsep dari J. Squires dimana awalnya dimulai dari preposisi

¹² Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Centre & Pustaka Pelajar, 2007. H. 2-9

yang mengatakan bahwa “untuk membangun teori politik yang memiliki perspektif gender, kita sebaiknya tidak melakukan dengan cara membuat teori politik yang bebas dari gender itu menjadi sebaliknya”. Menurutnya, langkah itu sebaiknya dimulai dengan membongkar terlebih dahulu apa yang menjadi pandangan pokok dalam teori politik arus utama (*mainstream political theory*) tentang gender dan isu-isu yang berkaitan dengannya.¹³

Squires juga mengemukakan, terdapat hubungan paradoks yang ganjil diantara politik dan gender. Di satu pihak, isu-isu gender adalah salah satu bidang yang sangat penting dalam politik. Di pihak lain, pada tingkat praktik dan kajian politik, keduanya sangat dipenuhi kalau tidak malah di dominasi oleh perspektif maskulin.¹⁴

Perbedaan jender pada proses berikutnya melahirkan peran jender dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tak pernah digugat. Berdasarkan studi yang dilakukan dengan menggunakan analisis jender ini ternyata banyak ditemukan pelbagai manifestasi ketidakadilan seperti berikut¹⁵:

- 1) Terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan

¹³ J. Squires, *Gender In Political Theory*, Cambridge: The Polity Press, 1999. Hal. 1-3.

¹⁴ Febrianto Syam, *Pemilu dan Perempuan (Studi Kasus: Modal Sosial dan Strategi Anggota Legislatif Perempuan DPR RI Terpilih Sulsel dalam PEMILU 2014)*, Tesis Universitas Indonesia, 2015. H. 16

¹⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, 1999. H. 72-76.

disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. Misalnya banyak perempuan desa tersingkirkan dan menjadi miskin akibat program pertanian revolusi hijau yang hanya difokuskan pada petani laki-laki.

- 2) Terjadi subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya kepada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun Negara, banyak kebijakan dibuat tanpa “menganggap penting” kaum perempuan. Misalnya anggapan karena perempuan toh nantinya akan ke dapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi, adalah bentuk subordinasi yang dimaksudkan.
- 3) Pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari *stereotype* itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat, banyak sekali *stereotype* itu terjadi yang dilekatkan kepada kaum perempuan yang berakibat membatasi, menyulitkan, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan. Karena adanya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah misalnya, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai “tambahan” dan oleh karenanya boleh saja dibayar lebih rendah.
- 4) Kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, karena perbedaan gender. Kekerasan ini mencakup

kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan dan penciptaan ketergantungan.

- 5) Karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama. Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling berkait dan secara dialektika saling mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu “tersosialisasi” kepada kaum laki-laki dan perempuan secara terus menerus, yang lambat laun akhirnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat.

Konsep jender dan politik ini kemudian menjadi acuan dalam menginterpretasikan keadaan politik yang terjadi di Kab. Luwu Utara sejauh mana pemahaman dan implementasi yang berbasis jender di dalam tatanan perpolitikan, utamanya adalah menyangkut keterwakilan perempuan yang sebetulnya sedang diupayakan dengan adanya kebijakan *affirmative action* yang sangat menyokong peran perempuan dalam politik.

2. Partisipasi dan Partai Politik

Partisipasi politik merupakan hal penting untuk menjalankan demokrasi itu sendiri. Partisipasi politik menurut Huntington dan Joan

Nelson adalah sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah.¹⁶ Pendapat Senada diungkapkan oleh Rasinski dan Taylor¹⁷ yang mengungkapkan bahwa inti partisipasi politik adalah tindakan masyarakat yang dapat mempengaruhi keputusan politik.

Memahami partisipasi politik lebih lanjut, Huntington dan Nelson menjelaskan mengenai spektrum partisipasi politik tersebut menurut mereka ada dua jenis partisipasi politik yang bergerak pada satu garis spektrum. *Pertama*, partisipasi otonom. *Kedua*, partisipasi mobilisasi.¹⁸

Partisipasi otonom adalah jenis partisipasi yang diharapkan oleh setiap masyarakat pada jenis ini keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan mengenai ide dan konsep tentang suatu hal pada pemerintah, mendirikan partai politik, menjadi kelompok penekan bagi pemerintah, memberikan haknya pada pemilihan umum dan sebagainya merupakan rangkaian yang diinginkan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Adapun partisipasi mobilisasi lebih mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan atau program baik politik ekonomi maupun sosial. Artinya, dalam partisipasi yang di mobilisasi manipulasi dan tekanan dari pihak lain (state ataupun private) sangat

¹⁶ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berembang*, Jakarta: Rineka cipta, 1994. H. 2

¹⁷ Kenneth A. Rasinski and Tom R. Tyler, *Political Behavior Annual*, Vol. 1, Colorado: Westview Press, 1986. H. 110

¹⁸ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berembang*, Jakarta: Rineka cipta, 1994. H. 9-14

signifikan terhadap partisipasi individu atau kelompok. Dalam bahasa Lukman Sutrisno disebutkan, kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.¹⁹

Sistem demokrasi juga membutuhkan partisipasi partai politik yang berorientasi pada upaya untuk merebut dan mempertahankan serta menjalankan kekuasaan dalam bentuk kebijakan umum. Dalam fungsi menjalankan politiknya, di negara yang menganut sistem demokrasi partai politik berhadapan satu sama lain. Austin Ranney mendefinisikan partai politik berdasarkan karakteristik dasar yang dimiliki oleh partai politik adalah. *Pertama*, berwujud kelompok masyarakat yang berisi identitas. *Kedua*, terdiri atas beberapa orang yang terorganisasi dan dengan sengaja bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan. *Ketiga*, masyarakat mengakui bahwa partai politik memiliki legitimasi berupa hak-hak untuk mengorganisasikan dan mengembangkan dirinya. *Keempat*, beberapa tujuannya, yaitu mengembangkan aktivitas, partai bekerja melalui mekanisme pemerintahan yang mencerminkan pilihan rakyat. *Kelima*, aktivitas inti partai politik adalah menyeleksi kandidat untuk jabatan publik.²⁰

Hal Senada juga dikemukakan oleh Alan Ware dalam bukunya, *Political Parties and Party System* menyebutkan bahwa partai politik

¹⁹ Loekman Soestrisno, *Menuju Masyarakat Partisipasi*, Jakarta: Kanisius, 1992. H. 207

²⁰ Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik*, Bandung: Pustaka Setia, 2013. H. 124

adalah institusi politik yang mencari pengaruh dalam suatu negara dengan tujuan mengisi posisi strategis dalam pemerintahan dan beberapa hal, partai politik berusaha mengagregasikan kepentingan dalam masyarakat sehingga kepentingan masyarakat dapat tersalurkan melalui partai politik.²¹

Royce C. Macridis, sebagaimana dikutip Ichlasul Amal mengemukakan beberapa fungsi partai politik yang relatif umum, yaitu representasi perwakilan konversi dan agregasi integrasi (partisipasi, sosialisasi dan mobilisasi), rekrutmen atau penerimaan anggota anggota baru dan pemilihan pemimpin, pertimbangan dan perumusan kebijaksanaan serta kontrol terhadap pemerintah.²²

Konsep demokrasi ini digunakan untuk menganalisa proses demokrasi dalam lingkup masyarakat Kab. Luwu Utara, khususnya mengenai pelibatan perempuan di ranah persaingan kontestasi politik. Selain itu, melihat partisipasi politik masyarakat Kab. Luwu Utara dalam meramaikan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum hingga kepada partai politik yang merupakan wadah demokrasi dalam menampung kepentingan politik masyarakat juga sebagai implementator kebijakan *affirmative action*.

²¹ Alan Ware, *Political Parties and Party System*, New York: Oxford University Press, 2000. H. 23

²² Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mukthahir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996. H. 26

3. Perilaku Pemilih

Perilaku Pemilih (*Voting Behaviour*) merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya atas manusia lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu yang lain. Dalam konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik²³

Menginterpretasikan kecenderungan pemilih menurut Dennis Kavanagh ada beberapa model yaitu sosiologis, psikologis dan rasional.²⁴

1) Sosiologis

Faktor sosiologis digambarkan peta kelompok masyarakat dan setiap kelompok dilihat sebagai basis dukungan terhadap partai tertentu. Pengelompokan ini bisa berdasarkan gender (perempuan dan laki-laki), usia (muda dan lanjut usia). Dapat pula berdasarkan organisasi formal dan informal. Pendekatan sosiologis mengasumsikan bahwa preferensi politik sebagaimana juga preferensi *voting*, adalah produk karakteristik sosio ekonomi, seperti pekerjaan, kelas, agama dan ideologi. Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial

²³ Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo. Jakarta. 1992. hal 15

²⁴ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2006. H.45

dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih.

2) Psikologis

Faktor psikologis yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal individu dalam bermasyarakat, yaitu: identifikasi partai orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, namun dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis.²⁵

3) Rasional

Faktor ini lahir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis dan psikologis. Pemikiran baru ini mempergunakan pendekatan ekonomi yang sering pula disebut sebagai pendekatan rasional. Pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Pendekatan ini melihat adanya untung rugi dalam melihat perilaku pemilih. Dalam

²⁵ Efriza, *Political Ecplore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung: Alfabet. 2012. H. 87

pendekatan rasional terdapat dua orientasi yang menjadi daya tarik pemilih, yaitu orientasi isu dan orientasi kandidat.²⁶

Maksud utama dari pencantuman pengertian dari perilaku politik ini adalah tentunya untuk menganalisis pokok permasalahan di dalam kajian ini yang secara garis besarnya menyangkut tentang bagaimana perilaku pemilih dalam kontestasi politik di Luwu Utara sehingga keterbagian suara yang signifikan angkanya itu terjadi terhadap kandidat perempuan. Konsep perilaku politik ini merupakan pisau analisis yang kemudian secara mendalam nantinya dipergunakan untuk membantu mendeskripsikan hasil kajian yang diperoleh peneliti.

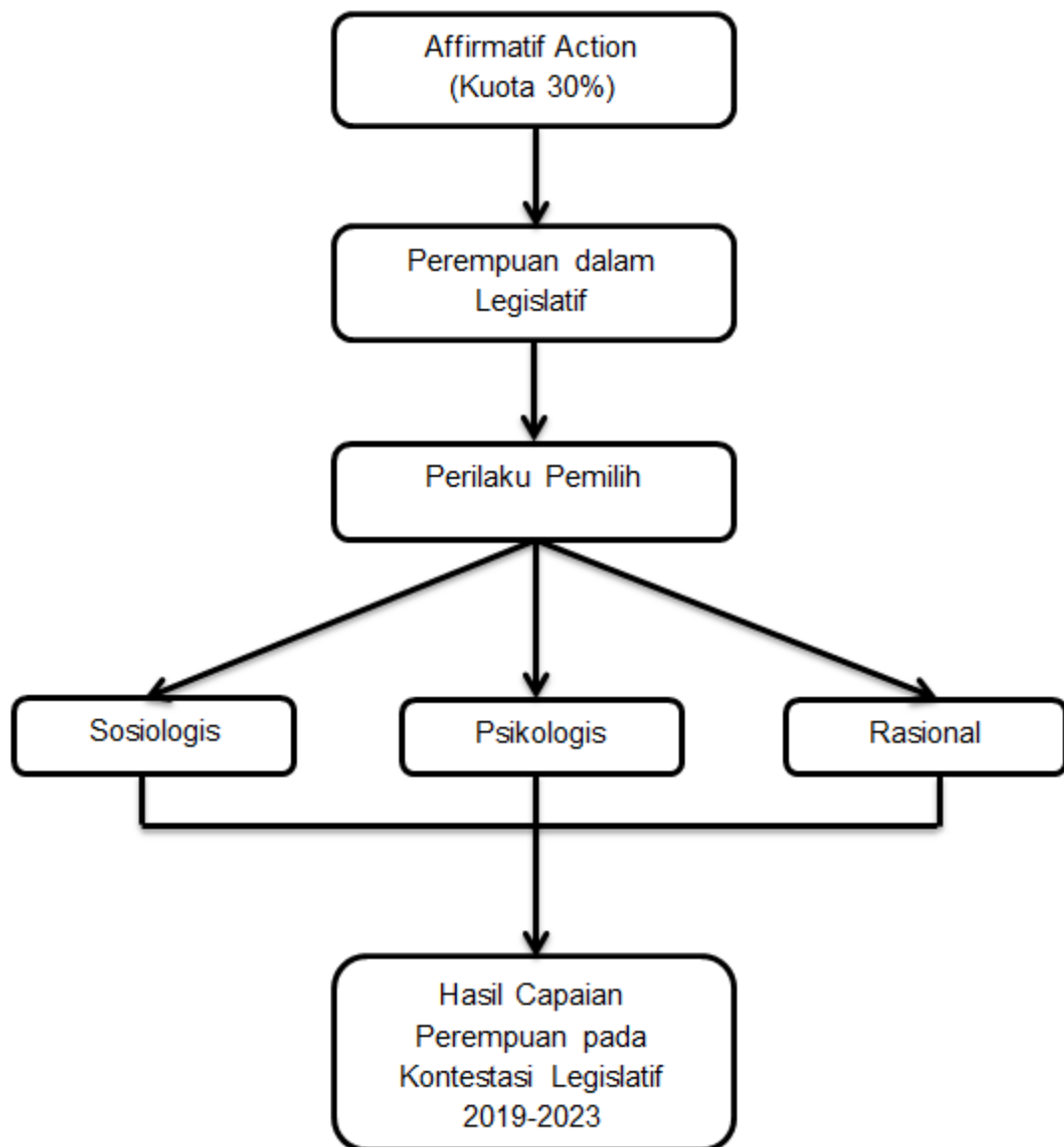
C. Kerangka Pikir Konseptual

Penelitian ini mengkaji mengenai perilaku pemilih yang menyebabkan adanya pembagian suara di pemilihan eksekutif dan legislatif tetapi batasan kerangka analisis terfokus pada kajian kandidat perempuan di eksekutif dan di legislatif kab. Luwu utara, mengingat tidak ada satupun kandidat perempuan yg lolos di Pemilihan Legislatif 2019 di Kab. Luwu Utara. Untuk menemukan dan memudahkan kajian penelitian ini, konsep perilaku politik dan demokrasi: partisipasi dan partai politik digunakan sebagai paradigma berfikir untuk memetakan batasan kajian yang selanjutnya akan lebih dalam di analisis dengan menggunakan

²⁶ Asep Ridwan, Memahami Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2004 di Indonesia, *Jurnal Demokrasi dan HAM* Vol. 4, No 1, 2004 H. 39.

konsep teori jender dan politik untuk menemukan interpretasi dari realitas yang terjadi.

Gambaran kerangka konsep sebagai alur pikir dalam kajian penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual